



WNPG XI



# RUMUSAN REKOMENDASI WIDYAKARYA NASIONAL PANGAN DAN GIZI XI 2018

Percepatan Penurunan *Stunting*  
melalui Revitalisasi Ketahanan Pangan dan Gizi  
dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

3–4 Juli 2018 | Hotel Bidakara, Jakarta



# RUMUSAN REKOMENDASI WIDYAKARYA NASIONAL PANGAN DAN GIZI XI 2018

Percepatan Penurunan *Stunting*  
melalui Revitalisasi Ketahanan Pangan dan Gizi  
dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

3–4 Juli 2018 | Hotel Bidakara, Jakarta







© 2018 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Rumusan Rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI/LIPI Press—Jakarta: LIPI Press, 2018.

vii hlm. + 33 hlm.; 14,8 x 21 cm

*Proofreader* : Tri Nuke Pudjiastuti  
Rahmi Lestari Helmi  
Anastasia Fitria Devi  
Noviastuti Putri Indrasari

Desainer Isi : Rusli Fazi  
Desainer Sampul : Rusli Fazi  
Ilustrator Sampul : Abdul Aziz



WNPG XI

Sekretariat:  
Biro Kerja Sama Hukum dan Humas LIPI  
Sasana Widya Sarwono Lt. 5  
Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta 12710  
Telp. 021-5225711 ext. 1236, 1240, 1233  
Fax. 021-5251834  
*E-mail:* [wnpg@mail.lipi.go.id](mailto:wnpg@mail.lipi.go.id)

 <https://wnpg.lipi.go.id>

 [fb.me/pangangiziID](https://fb.me/pangangiziID)

 [@pangangizi\\_ID](https://twitter.com/pangangizi_ID)

 [@pangangizi\\_ID](https://www.instagram.com/pangangizi_ID)

# SEKAPUR SIRIH

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta pada tanggal 3–4 Juli 2018 telah membuktikan kepada kita semua bahwa bekerja sama secara baik menjadikan kita mampu lebih jernih melihat salah satu persoalan bangsa, yaitu *stunting* dari berbagai pendekatan dan sudut pandang. Tantangan nasional terkait dengan prevalensi *stunting* mendesak untuk menjadi perhatian tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, akademisi, industri, dan pegiat masyarakat. Tentu perhatian tidak hanya terjadi dalam ruang-ruang diskusi, tetapi pentingnya keterlibatan berbagai pihak melakukan aksi sesuai dengan perannya masing-masing dalam upaya pencegahan *stunting*.

WNPG XI saat ini melakukan pendekatan interdisiplin dalam merumuskan strategi, melalui bidang-bidang atau kelompok kerja yang komprehensif, mencakup berbagai pokok bahasan serta melibatkan berbagai pihak sehingga rumusan yang dihasilkan diharapkan dapat diimplementasikan oleh banyak pihak, khususnya para akademisi. Forum ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para akademisi untuk mengembangkan penelitian dasar maupun terapan serta para praktisi dan pengambil kebijakan sehingga dapat memberikan solusi pada peningkatan pangan dan gizi masyarakat yang pada ujungnya akan mampu berkontribusi pada pencegahan *stunting*.

Inovasi-inovasi teknologi harusnya dapat lebih berperan dalam upaya pengurangan dan pencegahan *stunting*, ilmu sosial juga memiliki kontribusi yang besar dalam mengubah perilaku hidup masyarakat untuk mendapatkan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat, sedangkan percepatan perbaikan sanitasi atau pengolahan pangan yang sehat membutuhkan teknologi yang tepat. Di sini tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuktikan perannya bagi bangsa Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pembicara dan pembahas, peserta, panitia, sponsor serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya WNPG XI Tahun 2018. Secara khusus, ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik disampaikan kepada *co-host*, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (dahulu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Badan Ketahanan Pangan — Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional telah berperan aktif dalam penyelenggaraan ini. Akhirnya, kami berharap semoga hasil rumusan rekomendasi WNPG XI, yang disusun ulang menjadi masukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, dapat ditindaklanjuti dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan program ke depan serta memberikan manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

Terima kasih.  
Ketua Pengarah,

**Dr. L.T. Handoko**

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

# DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	iii
DAFTAR SINGKATAN	vii
PENDAHULUAN	1
I. PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT	7
II. PENINGKATAN AKSESIBILITAS PANGAN YANG BERAGAM	11
III. PENINGKATAN PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN	13
IV. PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	13
V. KOORDINASI PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI	21
TIM PENYUSUN	25
LAMPIRAN PESERTA BERDASARKAN KETERWAKILAN	29



WNPG XI

# DAFTAR SINGKATAN

ASI	air susu ibu
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
EMTEK	Elang Mahkota Teknologi
GAPMMI	Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman seluruh Indonesia
IPB	Institut Pertanian Bogor
Kemendo	Kementerian Koordinator
KIEA	komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi
K/L	Kementerian/Lembaga
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MP-ASI	makanan pendamping air susu ibu
PERGIZI PANGAN	Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan
PERSAGI	Persatuan Ahli Gizi Indonesia
PMK	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Poltekkes	Politeknik Kesehatan
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PPN	Perencanaan Pembangunan Nasional
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDG	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	sumber daya manusia
SEAFST	<i>Southeast Asia Food and Agricultural Science and Technology</i>
SPM	standar pelayanan minimal
WNP	Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi



WNPG XI

## WIDYAKARYA NASIONAL PANGAN DAN GIZI (WNPNG) XI

# PENDAHULUAN

*Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh secara fisik dan kecerdasan pada anak usia 1000 hari pertama kehidupan akibat kekurangan gizi kronis. *Stunting* merupakan isu nasional yang kompleks bagi bangsa Indonesia. Hasil Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan Balitbangkes tahun 2013 menunjukkan sekitar 37% (hampir 9 juta) anak balita mengalami *stunting*. Selain itu, menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2017<sup>1</sup>, Indonesia menempati posisi negara dengan prevalensi *stunting* ke lima terbesar di dunia. Data Bank Dunia tahun 2017 menunjukkan bahwa kondisi anak *stunting* tersebar dari Aceh hingga Papua dan tidak hanya dialami oleh anak dari rumah tangga miskin, tetapi juga dialami oleh keluarga tidak miskin. Dapat diprediksikan ketika usia emas Indonesia, yaitu pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami setidaknya sekitar 9 juta anak-anak usia produktif yang mengalami kesulitan untuk bersaing dan mengurangi pertumbuhan produktivitas pasar kerja. Kerawanan daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan kerawanan bagi daya saing nasional secara keseluruhan.

Pemerintah telah lama mengupayakan kebijakan dan program serta strategi intervensi, bahkan pada tahun 2017 telah terjadi perubahan kebijakan dengan pendekatan integrasi dan konvergensi secara kebijakan-program-strategi diawali 100 kabupaten dengan 1000 desa guna pencegahan *stunting*. Selain itu, telah keluar pula Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2017–2019 pada bulan Oktober 2017. Namun demikian, mengingat kompleksitas permasalahan *stunting* yang multi-dimensional,

---

<sup>1</sup> Data berdasarkan publikasi yang berjudul "100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*)", Volume 1 yang disusun oleh TNP2K - Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

kita tidak bisa hanya mengharapkan kementerian dan lembaga pemerintah, melainkan semua elemen bangsa, yaitu industri, akademisi dan masyarakat untuk menunjukkan kepedulian dengan secara aktif berperan sesuai tugas dan kapasitasnya masing-masing.

WNPG merupakan forum lintas pemangku kepentingan, yang diselenggarakan secara berkala 4 tahunan, dan pada tahun 2018 difokuskan pada upaya penurunan prevalensi *stunting* di Indonesia, di mana sekaligus merupakan salah satu target penting dalam capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*; SDGs). Tema WNPG XI Tahun 2018 yaitu "*Percepatan Penurunan Stunting Melalui Revitalisasi Ketahanan Pangan dan Gizi dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*".

Untuk itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama-sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Badan Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional mempersiapkan pembahasan substansi sejak Januari 2018 melalui kelompok diskusi terarah (*Focus Group Discussion*) maupun seminar/lokakarya pra-WNPG. Sejak awal, berbagai kementerian, lembaga, universitas, asosiasi maupun pihak industri dan pegiat masyarakat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan penyusunan perumusan rekomendasi.

**Fokus bahasan terbagi dalam bidang-bidang, yaitu:**

- I. Peningkatan Gizi Masyarakat
- II. Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam
- III. Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan
- IV. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- V. Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi

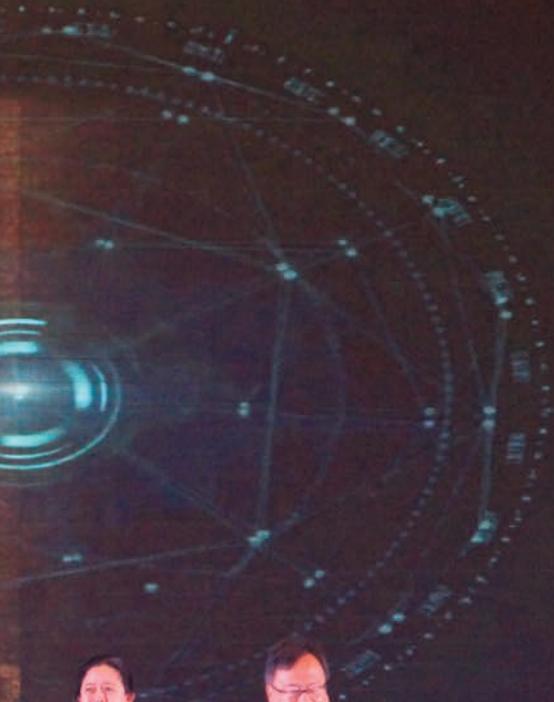
Antusias publik tecermin dari jumlah kehadiran dan keterlibatan peserta WNPG XI pada tanggal 3–4 Juli 2018, yaitu mencapai 1085 orang yang mewakili 130 organisasi/lembaga yang terdiri atas 25 perwakilan pemerintah

pusat dari kementerian/lembaga (K/L), 30 perwakilan pemerintah daerah, 39 perwakilan perguruan tinggi/politeknik, 13 perwakilan organisasi profesi/lembaga masyarakat, 10 perwakilan industri dan 13 perwakilan organisasi internasional. Proses panjang dan intensif sejak Pra-WNPG telah menghasilkan draf rancangan rekomendasi yang dibawa dalam forum WNPG XI untuk kembali didiskusikan dan dibahas serta dipertajam. Oleh karena itu, Rumusan Rekomendasi WNPG XI yang disusun telah meliputi berbagai aspek, yaitu regulasi dan kebijakan; program, monitoring dan evaluasi, kelembagaan dan koordinasi; pemberdayaan masyarakat; dan riset guna memperkuat kebijakan dan program serta strategi pencegahan *stunting* di masa mendatang.



WIRF Q XI 2018

BIDAKAR





WNPG XI

# I. PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT

## 1. Aspek Regulasi dan Kebijakan

- a. Penyempurnaan istilah kategori status gizi pada Standar Antropometri Anak serta penetapan Standar Antropometri bagi Ibu Hamil dan Dewasa;
- b. Penyempurnaan Angka Kecukupan Gizi dengan rerata Angka Kecukupan Energi 2.100 kkal dan Angka Kecukupan Protein 57 gram per kapita per hari, dan penyempurnaan Acuan Label Gizi serta Pedoman Pelabelan Gizi;
- c. Penggunaan dan perbaharuan Data Komposisi Pangan Indonesia secara berkelanjutan dan rutin di instansi terkait untuk penilaian, perencanaan konsumsi, dan penyediaan pangan;
- d. Pengusulan pangan untuk keperluan medis khusus yang berfungsi sebagai obat terkait paket manfaat sesuai *Indonesian Case Based Groups* untuk masuk dalam Formularium Nasional dan skema pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- e. Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal (SPM) perlu ditindaklanjuti melalui adanya petunjuk teknis untuk seluruh kelompok sasaran, agar Pelayanan gizi tercantum dalam SPM Kesehatan.

## 2. Aspek Program, Monitoring dan Evaluasi

- a. Pemodelan perbaikan gizi, terutama pencegahan *stunting* dilakukan melalui pendekatan wilayah, faktor dominan penyebab, sistem pangan, konvergensi intervensi spesifik-sensitif, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan;
- b. Pengembangan sistem surveilans gizi yang memastikan setiap data di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) termasuk *stunting* secara detail hingga tingkat desa secara intensif untuk memastikan intervensi tepat sasaran;
- c. Peningkatan kampanye gizi seimbang dan "Isi Piringku" terutama anak sekolah, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini, dilengkapi pemantauan dan evaluasi menggunakan indeks gizi seimbang secara berkelanjutan;
- d. Integrasi materi gizi seimbang dalam kurikulum atau proses pembelajaran untuk anak sekolah mulai pendidikan anak usia dini sampai sekolah lanjutan tingkat atas;
- e. Peningkatan penyediaan dan konsumsi pangan hewani, sayur dan buah sesuai anjuran gizi seimbang terutama pada desa-desa prioritas perbaikan gizi, termasuk *stunting*;
- f. Penyediaan/penempatan tenaga gizi (*nutritionist*) sebanyak satu orang di setiap desa prioritas perbaikan gizi, termasuk *stunting*. Tenaga ini sekaligus disiapkan untuk penguatan perencanaan gizi spesifik dan sensitif dalam Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat desa dan kecamatan;
- g. Pengembangan sistem penghargaan atau sanksi bagi kepala desa, camat, bupati/walikota, gubernur, menteri dan lembaga yang melakukan koordinasi dan capaian target dalam pembangunan pangan dan gizi dengan baik/tidak baik;

- h. Pengembangan sistem penghargaan bagi perusahaan (dunia usaha), organisasi masyarakat, pendidikan tinggi, dan organisasi profesi yang melakukan kegiatan/program *public-private-people professional partnership* yang terbukti berhasil memperbaiki pangan dan gizi masyarakat.

### 3. Aspek Kelembagaan dan Koordinasi

Penguatan kelembagaan kelompok kerja standar mutu dan kecukupan gizi menjadi sekretariat nasional standar pangan dan gizi di bawah koordinasi LIPI agar melaksanakan fungsinya secara berkelanjutan.

### 4. Aspek Riset

- a. Penyusunan peta jalan penelitian gizi yang komprehensif yang dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagai bagian dari peta jalan besar penelitian pangan dan gizi, menjadi masukan bagi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, untuk dasar perumusan standar, perencanaan, dan evaluasi kebijakan program pangan dan gizi;
- b. Pengembangan model intervensi *stunting* dengan mempertimbangkan hasil penelitian formatif yang berkaitan dengan faktor sukses dan faktor gagal perbaikan gizi pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota serta mempertimbangkan pengalaman sukses dari mancanegara;
- c. Penguatan pengembangan pangan lokal berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan peran perguruan tinggi, badan penelitian dan pengembangan di berbagai level pemerintahan serta dunia usaha sebagai bagian dari upaya perbaikan gizi masyarakat;

- d. Pengembangan pangan fungsional yang diarahkan pada peningkatan fungsi atau penurunan risiko penyakit sebagai upaya promotif dan preventif dengan mengutamakan pemenuhan gizi seimbang;
- e. Pengembangan penelitian tentang media/instrumen pendidikan gizi yang efektif sesuai kelompok sasaran dengan mempertimbangkan spesifik lokal.

## II. PENINGKATAN AKSESIBILITAS PANGAN YANG BERAGAM

### 1. Aspek Regulasi dan Kebijakan

- a. Penetapan pola kebutuhan pangan di tingkat nasional dan daerah, berdasarkan kelompok pangan dan komoditas berbasis keragaman lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk dan kebutuhan lainnya sebagai dasar perencanaan peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dikhususkan pada wilayah-wilayah dengan angka *stunting* tinggi;
- b. Evaluasi kebijakan dan identifikasi faktor-faktor kritis implementasi penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dengan komoditas yang cocok dibudidayakan di wilayah setempat, disertai dengan perubahan perilaku konsumsi dalam upaya menanggulangi ketergantungan terhadap beras dan terigu;
- c. Penjaminan ketersediaan dan akses air minum serta irigasi pertanian terutama di seluruh lokasi prioritas penanggulangan *stunting*.

### 2. Program, Monitoring dan Evaluasi

- a. Penambahan jumlah fasilitas infrastruktur penyimpanan dan fasilitas pendukung serta mengupayakan pemerataan, sebagai *buffer stock* terutama untuk pangan hasil hewani agar terkoneksi dengan jalur rantai pasok dengan biaya yang terjangkau;
- b. Pengembangan, pemberian fasilitas, dan pemanfaatan sistem *e-commerce* untuk menekan biaya sehingga harga komoditas menjadi lebih terjangkau;

- c. Peningkatan konsumsi pangan hewani, sayur, dan buah terutama bagi kelompok sasaran di lokasi prioritas penanggulangan *stunting* dan kelompok rawan gizi lainnya melalui sosialisasi kepada ibu hamil, anak sekolah, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), dan lembaga masyarakat lainnya, subsidi harga pangan, dan peningkatan penghasilan rumah tangga;
- d. Peningkatan pemenuhan penyediaan pangan yang makin beragam dan bergizi melalui pangan olahan, pangan yang difortifikasi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak-anak, dan remaja;
- e. Pemberian bantuan pangan nontunai bukan hanya pangan karbohidrat, namun juga pangan protein hewani dan minyak nabati yang difortifikasi vitamin A, dengan terus menjaga ketersediaannya yang berkelanjutan;
- f. Pendidikan kepada calon pasangan usia subur maupun orang tua yang memiliki anak balita tentang pemilihan pangan yang aman, beragam, dan bergizi seimbang yang dapat dipraktikkan sesuai dengan kondisi setempat.

### 3. Aspek Riset

Penelitian pangan lokal yang diarahkan untuk pengembangan inovasi pangan yang menjadi mudah dan tahan disimpan, cita rasa yang bisa diterima, mudah dalam penyajiannya, dan harga yang terjangkau.

# III. PENINGKATAN PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN

## 1. Aspek Kebijakan dan Regulasi

Penguatan dan implementasi program pengembangan regulasi di sepanjang rantai pasok pangan (produksi, distribusi, konsumsi) dengan menerapkan prinsip *Good Regulatory Practices*.

## 2. Aspek Program, Monitoring, dan Evaluasi

- a. Penguatan lembaga penilai kesesuaian meliputi pengadaan dan/atau penguatan laboratorium uji dan/atau kalibrasi, penguatan jejaring, lembaga sertifikasi, lembaga penjamin halal, dan lembaga inspeksi;
- b. Penguatan program *risk communication* oleh *competence authorities* di bidang keamanan dan mutu pangan;
- c. Pengembangan sistem pengakuan penjaminan keamanan dan mutu pangan yang dilaksanakan melalui skema jaminan pihak ke tiga (lembaga akreditasi dan sertifikasi independen; *3<sup>rd</sup> Party Assurance Scheme*);
- d. Penambahan materi keamanan dan mutu pangan di sepanjang rantai pasok pangan dalam komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi (KIEA) pencegahan *stunting*;

- e. Mengadopsi hasil kajian *Food and Agriculture Organization/World Health Organization* 2017 yang telah dikembangkan sebagai kerangka berpikir logis untuk membantu sistem nasional keamanan dan mutu pangan di Indonesia;
- f. Pengembangan pedoman pengawasan sesuai kerangka sistem nasional keamanan dan mutu pangan yang efektif dan efisien (tidak tumpang tindih);
- g. Pengembangan pedoman monitoring dan evaluasi sesuai kerangka sistem nasional keamanan dan mutu pangan;
- h. Pengembangan program pendidikan bagi pembina, pengawas, perumus, negosiator kebijakan, dan pelaku usaha, di bidang keamanan, kehalalan, dan mutu pangan.

### 3. Aspek Kelembagaan dan Koordinasi

- a. Implementasi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 membutuhkan lembaga yang berperan sebagai "Koordinator Nasional Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan";
- b. Penguatan koordinasi kelembagaan, penegakan hukum; impor-ekspor pangan; pemerintah pusat-pemerintah daerah dan peningkatan peran pemerintah daerah dalam penjaminan keamanan dan mutu pangan; koordinasi kelembagaan penelitian dan pengembangan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan industri. Selain itu, dibutuhkan penguatan koordinasi *competence authorities* bidang keamanan dan mutu pangan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama;
- c. Implementasi sistem surveilans keamanan pangan dan sistem penanganan kedaruratan keamanan pangan;
- d. Pengembangan sistem saling pengakuan antar-*competence authorities (risk managers)*;
- e. Penguatan program dan independensi lembaga pengkaji risiko keamanan pangan nasional.

## 4. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

- a. Mewajibkan penerapan pedoman praktik yang baik pada produksi pangan olahan tertentu, misalnya makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) untuk menunjang 1000 hari pertama kehidupan;
- b. Konsolidasi implementasi sistem pembinaan dan pengawasan keamanan pangan terpadu melibatkan multisektor, baik untuk pangan segar, pangan olahan maupun pangan khusus; dan industri pangan terutama di era digital; serta sistem dan skema khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah di sepanjang rantai pasok pangan dari hulu ke hilir yang melibatkan petani, nelayan, petambak, pengolah, dan lainnya;
- c. Penguatan peran serta masyarakat dalam KIEA keamanan dan mutu pangan terutama di era digital;
- d. Pemberdayaan tokoh masyarakat dalam perubahan perilaku untuk membangun budaya keamanan dan mutu pangan dengan sumber daya lokal (SDM, sumber daya alam, dan pendanaan).

## 5. Aspek Riset

- a. Pengembangan *National Risk Profilling* dan *National Risk Ranking*;
- b. Penyusunan peta jalan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang keamanan dan mutu pangan;
- c. Penghitungan beban keamanan pangan dan penyakit bawaan pangan (*food borne diseases*);
- d. Pengaruh perubahan iklim terhadap keamanan dan mutu pangan di Indonesia;
- e. Pengkajian isu keamanan dan mutu pangan serta perdagangan global di era digital dalam hubungannya dengan SDGs;
- f. Penelitian lebih mendalam tentang *stunting* yang berkaitan dengan keamanan dan mutu pangan, termasuk studi infeksi dan mikrobioma;

- g. Pengembangan riset dan kajian untuk keperluan peningkatan daya saing produk pangan Indonesia dalam upaya penyusunan regulasi (standar, pedoman, dan praktik baik) secara regional maupun internasional, antara lain forum *Association of Southeast Asian Nations*, *Codex*, *International Plant Protection Convention*, *World Organization for Animal Health*, dan *World Trade Organization*.

# IV. PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

## 1. Aspek Regulasi dan Kebijakan

- a. Mewajibkan kepala daerah untuk membuat regulasi turunan (peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan walikota) dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat sebagai upaya sinergis mendorong perubahan perilaku;
- b. Mewajibkan kepala daerah untuk membuat regulasi turunan (peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan walikota) dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai upaya sinergis mendorong perubahan perilaku;
- c. Penyempurnaan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar komponen promotif dan preventif menjadi bagian dari pembiayaan yang ditanggung oleh BPJS;
- d. Memasukkan perubahan perilaku hidup sehat ke dalam materi pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diikuti oleh peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Memasukkan perubahan perilaku hidup sehat ke dalam materi pembekalan bagi calon pengantin dalam koordinasi Kementerian Agama;
- f. Konvergensi regulasi lintas sektoral antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk perlindungan anak guna mencegah pernikahan dini;
- g. Mewajibkan penggunaan dana desa untuk program-program yang mendukung perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

## 2. Program, Monitoring dan Evaluasi

- a. Menyusun program intervensi perubahan perilaku untuk pencegahan *stunting* yang melibatkan institusi pendidikan, organisasi profesi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Intervensi meliputi advokasi komitmen *stakeholders*, advokasi media (media massa dan media sosial), kampanye media, peningkatan kompetensi bidan dan pemberdayaan kader, kunjungan rumah oleh Puskesmas, ceramah tokoh agama dan tokoh masyarakat serta mobilisasi masyarakat sebagai saluran utama program perubahan perilaku, yang terintegrasi fokus, lokus dan jadwal dengan intervensi spesifik dan sensitif, dan pengembangan materi KIAE perubahan perilaku pencegahan *stunting*;
- b. Menerapkan strategi komunikasi perubahan perilaku yang mengadaptasi kearifan lokal terkait pola asuh, pola konsumsi, lingkungan yang higienis, memperkuat budaya yang positif, dan merekayasa budaya yang negatif menjadi positif;
- c. Membuat gerakan perubahan perilaku pencegahan *stunting* dengan kelompok sasaran utama: remaja putri, calon ibu, ibu hamil, dan ibu dengan anak balita, didukung oleh ayah, anggota keluarga lainnya, bidan, kader dan warga desa/kelurahan di mana kelompok sasaran utama berada. Gerakan perubahan perilaku untuk mewujudkan "Anakku Hebat Bangsa Kuat" meliputi:
  1. Remaja putri merencanakan kapan menikah, mengonsumsi pangan bergizi seimbang dan aman, minum tablet tambah darah setiap minggu, dan menjaga lingkaran lengan atas tidak kurang dari 23,5 cm;
  2. Ibu hamil secara rutin minum tablet besi dan asam folat tanpa absen, mengikuti kelas ibu hamil dan mempersiapkan "Sukses ASI";
  3. Pemeriksaan kehamilan dan konseling di fasilitas kesehatan dilakukan sesuai jadwal;
  4. Ibu melahirkan di fasilitas kesehatan dan langsung melakukan Inisiasi Menyusu Dini berkualitas;

5. Ibu memberikan air susu ibu (ASI) Eksklusif enam bulan penuh dan meneruskan pemberian ASI sampai 2 tahun atau lebih, mulai memberikan MP-ASI pada saat bayi tepat berusia enam bulan dengan menu makanan bervariasi;
  6. Melakukan pemeriksaan kesehatan bayi, ukur, timbang, memberikan imunisasi, obat kecacingan dan vitamin sesuai jadwal;
  7. Ibu dan ayah rajin bercerita dan bercanda dengan bayi sejak baru lahir sampai remaja;
  8. Mengonsumsi air minum yang sehat, aman, dan bebas dari cemaran.
  9. Menggunakan jamban dan tangki septik yang aman sesuai standar nasional Indonesia dengan pengurusan tangki septik terjadwal serta sistem drainase rumah tangga yang didukung sistem drainase dan pengolahan limbah di tingkat desa;
  10. Cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir di lima waktu penting (sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan, sebelum memberi makan, sesudah buang air besar, dan sesudah memegang binatang);
  11. Rumah sehat dengan sistem ventilasi dan cahaya alami yang cukup, bebas tikus dan jentik nyamuk, dan ada tempat penyimpanan makanan yang tertutup;
- d. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terhadap perubahan perilaku.

### 3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

- a. Untuk mewujudkan “Anakku Hebat Bangsa Kuat”, harus melibatkan seluruh potensi masyarakat demi terbangunnya kemandirian masyarakat dalam memutuskan dan membangun kesehatan dan kesejahteraannya, melalui mobilisasi masyarakat yang dimotori oleh Kepala Desa. Warga desa secara bersama menemukan perilaku kesehatan yang ideal, perilaku layak yang dapat mereka lakukan

sekarang, menyepakati solusi yang dapat mereka kerjakan sendiri serta dukungan pemerintah.

- b. Intervensi perubahan perilaku untuk pencegahan *stunting* harus memperhatikan penguatan lingkungan (*enabling factor*) dan pemberdayaan masyarakat meliputi upaya peningkatan pendapatan, pemahaman dan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat yang memengaruhi pola asuh, pola konsumsi, dan kesehatan lingkungan.

#### 4. Aspek Kelembagaan dan Koordinasi

Untuk konvergensi dan kesinambungan program perubahan perilaku hidup bersih dan sehat perlu ditetapkan koordinator program oleh presiden.

#### 5. Aspek Riset

- a. Penelitian formatif yang disesuaikan dengan konteks lokal sebagai bahan data dasar dalam penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku.
- b. Penelitian formatif yang disesuaikan dengan perilaku hidup sehat menurut usia (terutama generasi milenial) termasuk dalam penggunaan gawai dan media sosial.

# V. KOORDINASI PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI

## 1. Aspek regulasi dan kebijakan

- a. Memperkuat regulasi dengan cara merevisi Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi sehingga kewenangan kelembagaan menjadi luas dan dapat menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan di berbagai tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan) dan dapat mengatur pelibatan pemangku kepentingan (dunia usaha, masyarakat madani, mitra pembangunan, perguruan tinggi dan organisasi profesi).
- b. Implementasi amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 dibutuhkan lembaga yang berperan sebagai “Koordinator Nasional Pangan dan Gizi;”
- c. Penurunan *stunting* sebagai indikator *outcome* pembangunan nasional secara eksplisit harus dicantumkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024, dengan prinsip pembangunan yang multisektor, holistik, integratif, dan berpihak kepada keluarga miskin, kelompok rawan gizi, terisolir, dan tertinggal. Kebijakan ini diturunkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. Kebijakan yang menjamin terintegrasinya sistem pangan (produksi, distribusi, konsumsi) dengan pencegahan *stunting* yang didukung oleh teknologi pangan dan industri inovatif guna meningkatkan nilai tambah (ekonomi, keamanan dan mutu pangan dan gizi), perubahan perilaku, dan penanggulangan kemiskinan.

## 2. Aspek Program, Monitoring dan Evaluasi

- a. Diperlukan instrumen untuk menjamin terlaksananya koordinasi program dan kegiatan yang efektif di pemerintah pusat (internal dan antar K/L), pemerintah daerah (internal pemerintah daerah), pusat dan daerah, pemerintah dan nonpemerintah, meliputi pemenuhan ketahanan pangan, perubahan perilaku, pelayanan kesehatan, dan penciptaan lingkungan sehat.
- b. Diperlukan advokasi dan sosialisasi pencegahan *stunting* secara sistematis kepada pemangku kepentingan, sehingga:
  1. Dunia usaha melakukan perbaikan gizi kepada pekerjanya; mendukung kebijakan pemerintah (seperti fortifikasi pangan, pengendalian gula, garam, dan lemak) serta menggunakan *Corporate Social Responsibility* untuk peningkatan gizi guna pencegahan *stunting*;
  2. Perguruan tinggi dan organisasi profesi melakukan pengabdian masyarakat, pendidikan gizi, dan mempersiapkan *evidence* dasar penyiapan program dan kegiatan;
  3. Masyarakat madani melakukan intervensi sesuai kondisi masyarakat, monitoring sosial dan pendampingan.
- d. Advokasi dan sosialisasi pencegahan *stunting* didukung oleh *Goodwill Ambassador* yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu;
- e. Kekurangan tenaga gizi di berbagai tingkat pemerintahan, baik di Puskesmas maupun desa/kelurahan dipenuhi melalui formasi aparatur sipil negara dan skema lain;
- f. SPM bidang kesehatan harus direvisi dengan memasukkan standar pelayanan gizi untuk setiap kelompok umur;
- g. Monitoring penggunaan input dan proses serta evaluasi capaian *output* dan *outcome*, termasuk mempersiapkan indikator keberhasilan daerah, dilakukan secara terintegrasi lintas K/L.

### 3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan keikutsertaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan *stunting* dan menggali sumber pendanaan di tingkat desa serta memberikan akses untuk memberdayakan keluarga miskin.

### 4. Aspek Kelembagaan dan Koordinasi

Memperkuat kelembagaan kabupaten/kota dan provinsi dengan menjadikan pimpinan tertinggi (bupati/walikota, gubernur) menjadi penanggung jawab pencegahan *stunting* yang disertai indikator keberhasilan daerah dalam pencegahan *stunting* serta menyiapkan indikator proses yang diperlukan dalam pencegahan *stunting*.

### 5. Aspek Riset

- a. Pemetaan *stunting* di Indonesia yang terkait dengan lokalitas, kontaminan, mutu pangan, perilaku, lingkungan, dan lainnya;
- b. Penyusunan peta jalan riset pangan dan gizi nasional dengan *output* yang terintegrasi dengan memperhatikan karakteristik lokal;
- c. Pengembangan produk-produk pangan yang bermutu.



WNPG XI

# TIM PENYUSUN

Ketua	: Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A.	(LIPI)
Wakil Ketua	: Dr. Bambang Sunarko	(LIPI)
Sekretaris	: Dra. Haning Romdiati, M.A.	(LIPI)

## Tim Perumus

- Bidang I	: 1. Prof. Dr. Hardinsyah	(PERGIZI PANGAN)
- Bidang II	: 2. Prof. Dr. Sri Raharjo, M.Sc.	(Universitas Gadjah Mada)
- Bidang III	: 3. Prof. Dr. Purwiyatno Hariyadi	(IPB / Komnas Codex Indonesia)
	4. Prof. Dr. Nuri Andarwulan	(IPB / SEAFASST Center)
- Bidang IV	: 5. Prof. Fasl Jalal	(Universitas Negeri Jakarta)
- Bidang V	: 6. Dr. Minarto	(PERSAGI)

## Tim Pakar

### Bidang I

1.	Ir. Doddy Izwardy, M.A.	(Kementerian Kesehatan)
2.	Prof. Dr. Ir. Sugiyono, M.App.Sc.	(Institut Pertanian Bogor)
3.	Dr. Abas B. Jahari, M.Sc.	(PERSAGI)
4.	Dr. Atmarita, Ph.D.	(PERSAGI)
5.	Dr. Rimbawan, M.Sc.	(Institut Pertanian Bogor)
6.	Dr. Marudut S., M.P.S.	(Poltekkes Jakarta II)
7.	Dr. Ir. Budi Setiawan, M.S.	(Institut Pertanian Bogor)
8.	Dr. dr. Damayanti R. Sjarif, Sp.A(K)	(Ikatan Dokter Anak Indonesia)
9.	Dr. dr. Rina Agustina, M.Sc., Ph.D.	(Universitas Indonesia)
10.	Galopong Sianturi, S.K.M., M.P.H.	(Kementerian Kesehatan)

11. Dr. Agus Triwinarto, S.K.M., M.Kes. (Kementerian Kesehatan)
12. Yuni Zahraini, S.K.M., M.K.M. (Kementerian Kesehatan)
13. Dr. Tedy Dirhamsyah, S.P., M.A.B. (Kementerian Kesehatan)
14. Dr. Ainia Herminiati, S.T., M.Si. (LIPI)
15. Yuly Astuti, M.A. (LIPI)
16. Puguh Prasetyoputra, M.H.Econ. (LIPI)

## Bidang II

1. Dr. Benny Rachman, APU. (Kementerian Pertanian)
2. Harlin, S.E., M.M. (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
3. Dr. Rachmi Widiarini (Kementerian Pertanian)
4. Ir. Wiji Lestari, M.P. (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
5. Prof. Dr. Hari Eko Irianto. (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
6. Prof.Dr.Ir. Ekowati Chasanah, M.Sc. (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
7. Drs. Muhtar, M.Si. (Kementerian Sosial)
8. Dr. Iwan Saskiawan (LIPI)
9. Dr. Enung S. Mulyaningsih, S.P., M.Si. (LIPI)
10. Vanda Ningrum, S.E., M.GM. (LIPI)

## Bidang III

1. Dr. Wahyu Purbowasito (Badan Standardisasi Nasional)
2. Ir. Tetty Helfery Sihombing, M.P. (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
3. Dra. Mauizzati Purba, Apt., M.Kes. (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
4. Yusra Egayanti, S.Si., Apt., M.P. (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
5. Roch Ratri Wandansari (GAPMMI)
6. Ir. Chandrini Mestika Dewi, M.Si. (Kementerian Perdagangan)
7. Innes Rahmania, A.Pi., S.Sos., M.M. (Kementerian Kelautan dan Perikanan)

8. Apriyanto D. Nugroho, S.T.P., M.Sc. (Badan Ketahanan Pangan)
9. Dr. Mego Pinandito (LIPI)
10. Dr. Linar Zalinar Udin (LIPI)
11. Anastasia Fitria Devi, Ph.D. (LIPI)

## Bidang IV

1. dr. Riskyana Sukandhi Putra, M.Kes. (Kementerian Kesehatan)
2. Dra. Herawati, M.A. (Kementerian Kesehatan)
3. Andi Sari Bunga Untung, S.K.M., M.Sc.P.H. (Kementerian Kesehatan)
4. Dr. RR. Dhian Proboyekti (Kementerian Kesehatan)
5. Tetty Sihombing (Praktisi Komunikasi)
6. Iwan Triono (EMTEK)
7. Risang Rimbatmaja, M.A. (Universitas Indonesia)
8. Dr. Hifni Alifahmi (Universitas Indonesia)
9. Ati Muchtar (Fortune Indonesia)
10. Dr. Astuti Lamid (Kementerian Kesehatan)
11. Dr. Dian Sulistiawati (Universitas Indonesia)
12. Dra. Haning Romdiati, M.A. (LIPI)
13. Esta Lestari, M.Econ. (LIPI)
14. Winitra Rahmani Astradiningrat, S.Sos (Kementerian Kesehatan)

## Bidang V

1. Pungkas Bajuri Ali, M.S., Ph.D. (Kementerian PPN/Bappenas)
2. Meida Octarina, M.C.N. (Kemenko PMK)
3. Prof. Dr. Aman Wiranatakusumah (Institut Pertanian Bogor)
4. Gantjang Amanullah, M.A. (Badan Pusat Statistik)
5. Dr. Ardiansyah (GAPMMI)
6. Dr. Entos Zainal, S.P., M.P.H.M. (Kementerian PPN/Bappenas)
7. Piping Setyo Handayani, S.S.T., M.S.E. (Badan Pusat Statistik)
8. Nina Hermayani S.Si., M.Si. (LIPI)

9. Lutfah Ariana, S.T.P., M.P.P., M.S.E. (LIPI)
10. Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E. (LIPI)
11. Nur Akbar Bahar, S.K.M., M.Kes. (Kementerian PPN/Bappenas)

## LAMPIRAN

# PESERTA BERDASARKAN KETERWAKILAN

### Lembaga/Kementerian (25)

1. Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
4. Kementerian Kesehatan / Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
5. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kementerian Pertanian / Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian / Badan Ketahanan Pangan
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. Kementerian Lingkungan Hidup
10. Kementerian Perindustrian
11. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
12. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
13. Badan Tenaga Nuklir Nasional
14. Kementerian Dalam Negeri
15. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
16. Kementerian Agama
17. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
18. Kementerian Sosial
19. Badan Pengawas Obat dan Makanan
20. Kantor Staf Presiden
21. Badan Standardisasi Nasional
22. Kementerian Perdagangan
23. Badan Intelijen Negara
24. Sekretariat Kabinet
25. Badan Pusat Statistik

### Pemerintah Daerah/ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Rumah Sakit (30)

26. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
27. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

28. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya
  29. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara
  30. Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
  31. Dinas Kesehatan Bogor
  32. Dinas Kesehatan Sibolga
  33. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
  34. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Klaten
  35. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
  36. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
  37. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
  38. Dinas Kesehatan Provinsi Riau
  39. Dinas Pangan Kabupaten Bangka
  40. Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
  41. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
  42. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
  43. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  44. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta
  45. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
  46. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
  47. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo
  48. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
  49. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
  50. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba
  51. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten
  52. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung
  53. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
  54. Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk
  55. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Biduk, Kabupaten Berau
- ### Politeknik Kesehatan/ Perguruan Tinggi (39)
56. Politeknik Kesehatan Kendari
  57. Politeknik Kesehatan Malang
  58. Politeknik Kesehatan Mamuju
  59. Politeknik Kesehatan Medan
  60. Politeknik Kesehatan Palu
  61. Politeknik Kesehatan Semarang
  62. Politeknik Kesehatan Yogyakarta
  63. Politeknik Kesehatan Bandung
  64. Politeknik Kesehatan Palembang
  65. Politeknik Kesehatan Tasikmalaya
  66. Politeknik Kesehatan Padang
  67. Universitas Negeri Medan
  68. Universitas Brawijaya
  69. Universitas Islam Negeri Jakarta
  70. Universitas Yarsi
  71. Universitas Muhammadiyah Jakarta
  72. Universitas Sriwijaya
  73. Universitas Hassanudin
  74. Universitas Negeri Surabaya

75. Universitas Tanjungpura
76. Universitas Jenderal Soedirman
77. Universitas Airlangga
78. Universitas Diponegoro
79. Universitas Sam Ratulangi
80. Universitas Lampung
81. Universitas Siliwangi
82. Universitas Gajah Putih
83. Universitas Maarif Hasyi Latief
84. Universitas Sumatera Utara
85. Universitas Muhammadiyah Jember
86. Universitas Singaperbangsa Karawang
87. Universitas Alma Ata
88. Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran'
89. Universitas Indonesia
90. Universitas Gadjah Mada
91. Institut Kesehatan Indonesia
92. Institut Pertanian Bogor
93. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Riau
94. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint Carolus

### Organisasi Profesi/Lembaga Masyarakat (13)

95. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman seluruh Indonesia
96. Persatuan Ahli Gizi Indonesia
97. Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan
98. Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia
99. Nasyiatul Aisyiah
100. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
101. Kamar Dagang dan Industri Indonesia
102. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
103. Keadilan Masyarakat Indonesia
104. Majelis Ulama Indonesia
105. Aliansi Organik
106. Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak
107. Slow Food Jabodetabek

### Industri/Swasta (9)

108. Hellen Keller International
109. PT Phapros Tbk
110. Fortune PR
111. Nurtreen
112. PT Indofood Sukses Makmur Tbk
113. SUN Business Network
114. PT Bakrie and Brothers Tbk
115. PT Kelola Mina Laut
116. PT Unilever Tbk
117. PH & H Lobby Firm

### Organisasi Internasional (13)

118. World Bank
119. UNICEF
120. World Food Programme
121. US Soybean Export Council
122. HiVOS
123. Global Alliance for Improved Nutrition
124. World Health Organization
125. Food and Agriculture Organization
126. FDI
127. Unified Physicians Network
128. Indonesian Nutrition Foundation for Food Fortification
129. CODEX
130. Save The Children



JAKARTA 3-4 Juli 2018





WIDYAKARYA NASIONAL PANGAN & GIZI

# WNPX XI 2018

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MELALUI REVITALISASI  
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI DALAM RANGKA  
MENCAIPI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BSN





**WNPG XI**

Sekretariat:

**Biro Kerja Sama Hukum dan Humas LIPI**

Sasana Widya Sarwono Lt. 5

Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta 12710

Telp. 021-5225711 ext. 1236, 1240, 1233

Fax. 021-5251834

E-mail: [wnpng@mail.lipi.go.id](mailto:wnpng@mail.lipi.go.id)



<https://wnpng.lipi.go.id>



@pangangizi\_ID



[fb.me/pangangiziID](https://fb.me/pangangiziID)



@pangangizi\_ID